



**PENGADILAN NEGERI  
TEBING TINGGI**

# RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021



**Jln. Merdeka No.2  
Tebing Tinggi - Sumatera Utara 20633  
Telp. 0621 21560 Fax : 0621 2610180  
Email : pn.tebingtinggi@gmail.com**

# KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

## (1965 – SEKARANG)



**H.M. YAHYA HARAHAP, SH**  
1965-1971



**H. BORIS HARAHAP, S.H**  
1971-1975



**O.H. SIMAMARTA, S.H.**  
1975-1980



**H. ARMEN LUBIS, S.H.**  
1980-1987



**BAGINDA HASIBUAN, S.H.**  
1987-1989



**MARSEL BUCHARI, S.H.**  
1989-1994



**MARAH IMAN HARAHAP, S.H.**  
1994-1998



**ABID SALEH MENDROFA, S.H.**  
1998-1999



**D.L. SAMOSIR, S.H.**  
1999-2001



**ASLI GINTING, S.H.**  
2001-2003



**VIKTOR S. ZAGOTO, S.H., M.HUM.**  
2003-2006



**ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H**  
2006-2009



**M. YUSAFRIHARDI GIRSANG, S.H., M.H.**  
2019-SEKARANG



**SUN BASANA HUTAGALUNG, S.H., M.H**  
2009-2011



**ELYTA RAS GINTING, S.H., LL.M**  
2011-2012



**SALAHUDDIN, S.H., M.H**  
2012-2014



**RIANA BR. POHAN, S.H., M.H**  
2014-2016



**M. YUSAFRIHARDI GIRSANG, S.H., M.H**  
2016-2017



**JARIHAT SIMAMARTA, S.H., M.H**  
2017-2018



**M. ARIF NURYANTA, S.H., M.H**  
2018-2019

## *KATA PENGANTAR*

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho, rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B Tahun 2021.



Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada dalam ruang lingkup Kota Tebing Tinggi.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap kepala satuan kerja wajib menyiapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Kinerja Tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

MOHAMMAD YUSAFRIHARDI GIRSANG, SH., MH  
NIP.196709161996031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2021  
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  
Jl. Merdeka No. 2 Tebing Tinggi  
Telp. 0621 21560 Fax. 0621 2610180  
Tebing Tinggi - Sumatera Utara 20633  
e-mail : pn.tebingtinggi@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO. W2.U10/ /OT.01.1/I/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD YUSAFRIHADI GIRSANG,SH.,MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : SETYAWAN HARTONO, S.H.,M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, Januari 2020

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Tinggi Medan

**Pihak Pertama**

Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

SETYAWAN HARTONO, S.H.,M.H.  
NIP. 195804011984031004

MOHAMMAD YUSAFRIHADI GIRSANG,SH.,MH  
NIP. 196709161996031001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**NO.W2.U10/ /OT.01.1/I/2020**  
**Pengadilan Negeri Tebing Tinggi**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	89%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	93%
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	12%
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	88%
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1%
		i. Index Kepuasan Pencari Keadilan	79%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%
		d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	50%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	5.947.839.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	25.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	143.140.000

Catatan :

Tebing Tinggi, Januari 2020  
Ketua,

MOHAMMAD YUSAFRIHADI GIRSANG,SH.,MH  
NIP. 196709161996031001

**RENCANA KINERJA  
TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2021**

# RENCANA KINERJA TAHUN 2021

(Target Kinerja RKT vs Target Kinerja RKA)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/ Rp
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	100%	
	b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%					
	c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%					
	d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	94%					
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%					
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	13%					
	g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	89%					
	h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2%					
	i. Index kepuasan pencari keadilan	80%					
	2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	100%

SasaranStrategis	IndikatorKinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/ Rp
	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%					
	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%					
	d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%					
	e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%					
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%			Pelaksanaan pos bantuan hukum	100%	
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%				50%	

